

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian global hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan ekonomi linear yang menerapkan pola *take-make-dispose* (ambil-pakai-buang). Dalam pola ini, sumber daya alam diperoleh dari lingkungan, diolah menjadi produk, dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, dan pada akhirnya dibuang sebagai limbah (Sakao et al., 2024). Praktik produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif yang bersifat sistemik, seperti peningkatan volume sampah, kerusakan ekosistem termasuk perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati serta rendahnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (Esposito et al., 2023). Kondisi tersebut berpotensi menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan karena sistem ekonomi linear menghasilkan tekanan lingkungan yang terus berulang dan dinilai tidak lagi mampu menjawab tantangan jangka panjang (Siregar et al., 2023).

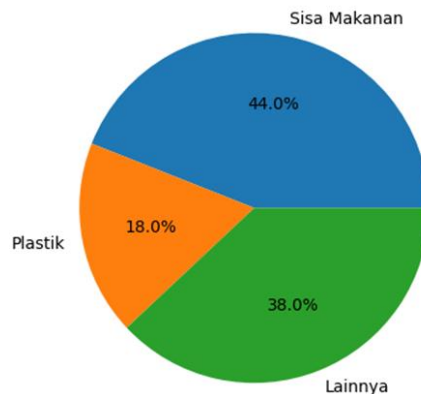
Peningkatan timbunan sampah nasional tercermin dari meningkatnya tekanan terhadap penggunaan sumber daya, yang ditunjukkan oleh kenaikan Konsumsi Material Domestik (*Domestic Material Consumption* atau DMC) sebesar 36% dalam sepuluh tahun terakhir (Bappenas, 2024). Kondisi ini sejalan dengan tingginya volume *food loss and waste* yang berada di sekitar 29,28 juta ton pada tahun 2022, serta kontribusi sampah plastik yang mencapai

sekitar 17-18% dari total sampah nasional (Bappenas, 2024; Waluyo & Kharisma, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem produksi dan konsumsi di Indonesia masih didominasi oleh pola ekonomi linear dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Selain itu, pada pertengahan tahun 2024 berbagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah besar seperti DKI Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta telah berstatus kelebihan kapasitas (*overcapacity*) (Bappenas, 2024). Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa sistem ekonomi yang berorientasi pada pola *take-make-dispose* (ambil-pakai-buang) tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. (Sakao et al., 2024) Salah satu pendekatan yang berkembang dan dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut adalah konsep ekonomi sirkular (*circular economy*) (Siregar et al., 2023) .

Perkembangan konsep ekonomi sirkular muncul sebagai respons atas keterbatasan ekonomi linear. Konsep ekonomi sirkular menekankan prinsip *reduce, reuse, recycle, dan recovery* serta produksi regeneratif (Sakao et al., 2024). Tujuan ekonomi sirkular adalah mempertahankan nilai penggunaan material selama mungkin melalui siklus sumber daya tertutup sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dipisahkan dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (Bjørnbet et al., 2021). Berbeda dengan konsep keberlanjutan yang bersifat luas, ekonomi sirkular memiliki indikator yang lebih operasional seperti efisiensi material, pengelolaan limbah berbasis daur ulang, penggunaan kembali bahan baku, serta desain produk berkelanjutan (Opferkuch et al., 2022).

Penelitian ini memfokuskan pada ekonomi sirkular karena konsep tersebut merepresentasikan bentuk konkret komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dalam praktik operasional yang dapat diukur.

Relevansi ekonomi sirkular semakin terlihat dalam konteks Indonesia yang dapat dilihat melalui komposisi timbulan sampah nasional sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1. Data tersebut menunjukkan bahwa sampah plastik dan sisa makanan masih mendominasi timbulan sampah nasional. Meskipun data tersebut disajikan dalam bentuk ringkasan nasional, kondisi ini tetap relevan dengan periode penelitian 2021-2024 karena mencerminkan pola struktural permasalahan sampah di Indonesia yang masih berlanjut hingga saat ini. Fenomena ini tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, di mana kehilangan ekonomi akibat *food loss and waste* diestimasikan mencapai Rp213-551 triliun per tahun atau setara dengan 4-5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Bappenas, 2021, 2024). Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang diproyeksikan terus meningkat hingga 5% pada tahun 2024, transparansi perusahaan melalui pengungkapan ekonomi sirkular menjadi instrumen akuntabilitas yang sangat mendesak guna menekan dampak lingkungan dari sistem produksi yang masih bersifat linear (Bappenas, 2024).



Gambar 1.1 Grafik Komposisi Timbulan Sampah Nasional Indonesia  
Sumber : Hasil Olahan Penulis (2026)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa limbah makanan (*food waste*) merupakan komponen terbesar dalam timbulan sampah nasional dengan proporsi mencapai 44,0%, diikuti oleh sampah plastik sebagai kontributor kedua terbesar dengan proporsi sebesar 18,0%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Indonesia tidak hanya didominasi oleh plastik, tetapi juga oleh limbah organik yang memiliki proporsi jauh lebih besar. Adapun kategori lainnya yang menyumbang sebesar 38,0% terdiri dari berbagai jenis sampah non-organik dan non-plastik, seperti kertas/karton, logam, kaca, tekstil, karet, kayu, serta sampah lainnya.

Kondisi tersebut mendorong perusahaan mulai mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular ke dalam strategi bisnisnya, pengelolaan limbah plastik melalui pendekatan ekonomi sirkular dipandang sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi bahan baku sekaligus mengurangi pencemaran tanah dan laut (Subekti, 2023). Integrasi prinsip ekonomi sirkular tidak hanya terbatas pada pengelolaan limbah tetapi juga ditempatkan sebagai elemen penting dalam inovasi model bisnis perusahaan yang berperan dalam

percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (Bjørnbet et al., 2021). Transformasi strategi bisnis menuju model berbasis ekonomi sirkular diperlukan untuk memperkuat ketahanan sistem produksi serta meningkatkan kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2024) . Namun, upaya integrasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pelaporan perusahaan.

Implementasi dan pelaporan ekonomi sirkular di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan institusional, praktik serta pengungkapan ekonomi sirkular di Indonesia masih tergolong baru dan belum memiliki standar pelaporan yang spesifik, sehingga tingkat pengungkapan antar perusahaan menunjukkan variasi yang cukup tinggi (Solikhah & Maulina, 2021). Kondisi tersebut membuka peluang penelitian untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pengungkapan ekonomi sirkular perusahaan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, diperlukan konteks sektor industri yang relevan.

Kebutuhan untuk memperoleh analisis yang lebih kontekstual menuntut pemilihan sektor penelitian yang tepat agar hasil penelitian lebih relevan dan spesifik (Opferkuch et al., 2022). Sektor *Consumer non-cyclicals* (CNC) dipilih karena sektor ini mencakup industri kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, farmasi, serta produk rumah tangga yang memiliki intensitas penggunaan bahan baku dan produksi limbah yang tinggi (Solikhah & Maulina, 2021). Produk dalam sektor tersebut dikonsumsi secara massal dan berulang sehingga rantai pasoknya memberikan dampak lingkungan yang signifikan.

Perusahaan dalam sektor CNC juga memiliki eksposur publik yang relatif tinggi sehingga tekanan dari konsumen dan investor terhadap praktik keberlanjutan cenderung lebih besar (Esposito et al., 2023). Karakteristik tersebut menjadikan sektor CNC sebagai konteks yang relevan untuk menguji faktor-faktor tata kelola yang memengaruhi pengungkapan ekonomi sirkular.

Urgensi penerapan ekonomi sirkular juga tercermin dalam praktik perusahaan pada sektor *Consumer non-cyclicals*. PT Unilever Indonesia Tbk telah mengembangkan sistem penggunaan kembali (*reuse*) serta menyediakan stasiun isi ulang (*refill station*) sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Di sisi lain, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah pangan di tengah tingginya timbulan *food waste* nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan limbah di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan plastik, tetapi juga limbah organik yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Selain itu, perusahaan produsen juga diwajibkan menyusun Peta Jalan Pengurangan Sampah sebagai bagian dari implementasi kebijakan *Extended Producer Responsibility* (Bappenas, 2024). Meskipun berbagai inisiatif tersebut telah dilakukan, tingkat pengungkapan ekonomi sirkular dalam laporan keberlanjutan perusahaan masih menunjukkan variasi, sehingga peran dewan komisaris menjadi penting untuk memastikan transparansi informasi kepada para pemangku kepentingan (Esposito et al., 2023). Meski demikian, permasalahan pengungkapan ekonomi sirkular tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pada tingkat global.

Perhatian terhadap ekonomi sirkular yang terus meningkat belum diikuti praktik pengungkapan yang memadai pada tingkat global. Bjørnset et al. (2021) menyatakan bahwa banyak perusahaan belum mengintegrasikan ekonomi sirkular secara jelas dalam sistem pelaporan karena belum adanya pemahaman yang seragam. Opferkuch et al. (2021) menambahkan bahwa ekonomi sirkular sering kali hanya dimasukkan sebagai bagian dari narasi keberlanjutan tanpa indikator terukur sehingga penilaian objektif menjadi sulit. Lepore et al. (2025) juga menunjukkan bahwa ketiadaan standar dan regulasi khusus menyebabkan tingkat pengungkapan ekonomi sirkular cenderung dangkal dan bervariasi antar perusahaan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan cara penilaian yang dapat menunjukkan prinsip sirkularitas secara langsung agar kualitas pengungkapan dapat dinilai secara sistematis dan terstandar. Mohammad et al. (2023) menunjukkan bahwa tantangan pengungkapan ekonomi sirkular di negara berkembang cenderung lebih besar dibandingkan negara maju. Waluyo & Kharisma (2023) menjelaskan bahwa lemahnya tekanan institusional dapat membuat perusahaan hanya memenuhi kewajiban hukum secara formal tanpa melakukan perubahan substantif. Kualitas pengungkapan juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola internal, khususnya peran dewan komisaris (Endrikat et al., 2021). Sementara respons perusahaan terhadap agenda keberlanjutan umumnya berlangsung secara bertahap (Rosati et al., 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan ekonomi sirkular tidak hanya bergantung pada kebijakan internal perusahaan,

tetapi juga dukungan regulasi pemerintah. Indonesia telah menetapkan Peta Jalan Ekonomi Sirkular 2025-2045 dengan sektor pangan dan ritel sebagai prioritas (Bappenas, 2024). Namun, penelitian menunjukkan bahwa regulasi wajib belum tentu meningkatkan kualitas pengungkapan dan praktik pelaporan nonkeuangan di negara berkembang masih cenderung berfokus pada kepatuhan administratif dibandingkan transparansi substantif (Hosani et al., 2025). Variasi tingkat pengungkapan antar perusahaan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan teoritis untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Variasi tersebut dapat dipahami melalui perspektif Teori Stakeholder dan Teori Keagenan. Teori Stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan perlu mengungkapkan informasi keberlanjutan untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan seperti konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat. Teori Keagenan menunjukkan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menimbulkan potensi asimetri informasi sehingga diperlukan mekanisme pengawasan, seperti peran dewan komisaris, untuk memastikan transparansi pengungkapan perusahaan (Lepore et al., 2025).

Berdasarkan kedua perspektif tersebut, mekanisme tata kelola perusahaan khususnya peran dewan komisaris menjadi elemen penting dalam mendorong pengungkapan ekonomi sirkular (Esposito et al., 2023). Efektivitas peran dewan komisaris dalam mendorong pengungkapan ekonomi sirkular tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya tetapi juga oleh karakteristik yang dimilikinya (Lepore et al., 2025).

Sebagai karakteristik awal, ukuran dewan komisaris mencerminkan kapasitas kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat strategis (Esposito et al., 2023). Dewan Komisaris yang lebih besar cenderung memiliki keberagaman keahlian dan perspektif sehingga dapat mendorong pengungkapan ekonomi sirkular yang lebih komprehensif (Endrikat et al., 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan keberlanjutan karena keberagaman perspektif mampu meningkatkan kualitas pengawasan (Anyigbah et al., 2023; Esposito et al., 2023). Namun, peneliti lain menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang terlalu besar justru dapat menurunkan efektivitas pengambilan keputusan, sehingga pengaruhnya tidak signifikan terhadap pengungkapan ekonomi sirkular, karena koordinasi dan komunikasi antaranggota menjadi lebih kompleks (Nuhu & Alam, 2024). Hal ini menegaskan bahwa ukuran dewan komisaris harus seimbang untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan tanpa menimbulkan hambatan operasional (Githaiga & Kosgei, 2023).

Ukuran dewan komisaris perlu didukung oleh kompetensi anggota dewan melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pengawasan perusahaan. Pendidikan tersebut tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikannya, tetapi juga dari kesesuaian bidang keilmuan dengan tugas pengawasan. Anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan dinilai lebih mampu memahami laporan perusahaan, menilai risiko strategis, serta mengevaluasi kebijakan keberlanjutan termasuk ekonomi

sirkular (Githaiga & Kosgei, 2023). Dewan komisaris dengan pendidikan yang relevan tersebut cenderung mendorong pengungkapan keberlanjutan yang lebih substantif karena memiliki kemampuan analitis dalam menilai informasi dan menuntut transparansi dari manajemen (Nuhu & Alam, 2024). Hal ini didukung oleh temuan Githaiga & Kosgei (2023) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan dengan latar belakang akuntansi dan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan perusahaan, karena kemampuan analitis mereka dalam memverifikasi akurasi informasi yang disajikan. Namun, dalam beberapa kondisi, pengaruh pendidikan dewan tidak signifikan apabila keputusan strategis masih didominasi oleh pemegang saham pengendali sehingga kapasitas keilmuan dewan tidak sepenuhnya (Mohammad et al., 2023).

Selain kualitas pendidikan anggota dewan, independensi juga menjadi faktor penting dalam efektivitas pengawasan. independensi dewan komisaris menentukan sejauh mana anggota dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif tanpa intervensi manajemen atau pemilik dominan. Dewan Komisaris independen diharapkan mampu mendorong transparansi pengungkapan ekonomi sirkular (Opferkuch et al., 2022). Penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan karena dewan independen dapat mengambil keputusan yang lebih berorientasi jangka panjang dan strategis (Endrikat et al., 2021). Namun, pengaruh independensi dapat menjadi tidak signifikan apabila keberadaan komisaris independen hanya formalitas untuk memenuhi regulasi, atau jika pemegang saham pengendali tetap mengontrol kebijakan strategis (Lepore et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa independensi efektif jika

disertai komitmen nyata perusahaan terhadap prinsip ekonomi sirkular.

Efektivitas pengawasan dewan komisaris tidak hanya bergantung pada independensi anggota dewan, tetapi juga pada bagaimana dewan menjalankan peran pengawasannya secara aktif. Frekuensi rapat dewan komisaris menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan. Semakin sering dewan komisaris rapat, semakin besar peluang isu strategis terkait ekonomi sirkular dibahas secara mendalam, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas pengungkapan (Esposito et al., 2023). Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan karena rapat yang rutin memungkinkan monitoring yang lebih ketat terhadap kebijakan ekonomi sirkular (Anyigbah et al., 2023). Namun, frekuensi rapat tidak selalu signifikan apabila pertemuan bersifat administratif semata, tanpa menghasilkan keputusan strategis substantif, dengan demikian, efektivitas rapat lebih ditentukan oleh kualitas pembahasan, bukan hanya jumlah pertemuan (Pamungkas, 2021).

Karakteristik Terakhir yaitu keberagaman *Gender* dimana anggota dewan komisaris memengaruhi sensitivitas terhadap isu sosial dan lingkungan, sekaligus mendorong pengambilan keputusan yang lebih etis, penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan karena keberadaan perempuan dalam dewan meningkatkan perhatian terhadap inovasi model bisnis berkelanjutan dan transparansi pengungkapan ekonomi (Lepore et al., 2025). Akan tetapi, dalam konteks negara berkembang atau perusahaan dengan kepemilikan terpusat, pengaruh keberagaman *Gender* tidak berpengaruh signifikan karena perempuan masih memiliki keterbatasan dalam pengambilan

keputusan strategis (Hosani et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa dampak keberagaman *Gender* bergantung pada konteks tata kelola, struktur kepemilikan, dan integrasi ekonomi sirkular dalam strategi inti perusahaan (Gavana et al., 2024; Mohammad et al., 2023).

Temuan yang beragam pada keberagaman *Gender* tersebut juga terlihat pada karakteristik dewan komisaris lainnya, seperti ukuran dewan, tingkat pendidikan, independensi, dan frekuensi rapat. Secara umum, hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan pengungkapan ekonomi sirkular masih menunjukkan pola temuan yang bervariasi antar studi, khususnya dalam konteks negara berkembang (Nuhu & Alam, 2024). Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengungkapan CSR atau ESG secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menempatkan pengungkapan ekonomi sirkular sebagai variabel dependen masih terbatas dan lebih banyak dilakukan di negara maju (Esposito et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola dalam mendorong transparansi ekonomi sirkular masih perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan ekonomi sirkular di Indonesia masih relatif terbatas, khususnya pada sektor *Consumer non-cyclicals* yang memiliki tingkat konsumsi sumber daya dan produksi limbah yang tinggi (Waluyo & Kharisma, 2023). Pentingnya penerapan ekonomi sirkular serta menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut dalam konteks Indonesia. Karakteristik sektor *Consumer non-cyclicals* yang memiliki dampak lingkungan besar menjadikan sektor ini relevan sebagai objek

penelitian. Periode penelitian terbaru, yaitu 2021-2024, juga belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya sehingga diperlukan penelitian empiris yang lebih kontekstual.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor *Consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024 dengan menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris, yaitu ukuran, tingkat pendidikan, independensi, frekuensi rapat, keberagaman *Gender*, dan pengalaman, terhadap kualitas pengungkapan ekonomi sirkular perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme tata kelola yang efektif dalam mendorong transparansi serta integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam strategi perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ekonomi sirkular pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*?
2. Apakah tingkat pendidikan anggota dewan komisaris memengaruhi pengungkapan ekonomi sirkular pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*?
3. Apakah tingkat independensi dewan komisaris berkontribusi terhadap pengungkapan ekonomi sirkular pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*?

4. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ekonomi sirkular pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*?
5. Apakah keberagaman *Gender* dalam dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ekonomi sirkular pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*?

### 1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan ekonomi sirkular pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia periode 2021-2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan ekonomi sirkular.
2. Mengkaji pengaruh tingkat pendidikan anggota dewan komisaris terhadap pengungkapan ekonomi sirkular.
3. Menganalisis pengaruh tingkat independensi dewan komisaris terhadap pengungkapan ekonomi sirkular
4. Menilai pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan ekonomi sirkular.
5. Menilai pengaruh keberagaman *Gender* dalam dewan komisaris terhadap pengungkapan ekonomi sirkular.

### 1.4 Manfaat

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pemahaman penulis mengenai peran tata kelola perusahaan, khususnya karakteristik dewan komisaris, dalam mendorong pengungkapan ekonomi sirkular. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan pemahaman penulis terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta penerapan prinsip ekonomi sirkular di Indonesia.

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi dan tata kelola perusahaan, khususnya terkait pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan ekonomi sirkular. Penelitian ini juga memperkaya kajian empiris yang mengintegrasikan perspektif teori stakeholder dan teori keagenan dalam konteks ekonomi sirkular di negara berkembang.
3. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur akademik di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah tata kelola perusahaan, akuntansi keberlanjutan, dan *sustainability reporting*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji topik terkait ekonomi sirkular, pelaporan keberlanjutan, serta peran dewan komisaris dalam meningkatkan transparansi perusahaan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengungkapan ekonomi sirkular atau faktor-faktor tata kelola perusahaan lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat membuka peluang pengembangan

variabel tambahan, perluasan sektor penelitian, maupun penggunaan metode analisis yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi manajemen perusahaan, khususnya dewan komisaris, mengenai pentingnya efektivitas struktur dan karakteristik dewan dalam mendorong pengungkapan ekonomi sirkular secara lebih transparan dan terukur. Dengan pengungkapan yang lebih berkualitas, perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi, serta kepercayaan pemangku kepentingan dalam mendukung strategi keberlanjutan jangka panjang.
6. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, seperti otoritas jasa keuangan (ojk) dan pemerintah, dalam merumuskan kebijakan pelaporan keberlanjutan dan ekonomi sirkular yang lebih jelas, terukur, dan terstandarisasi, sehingga dapat mendorong transparansi serta kualitas pengungkapan perusahaan di Indonesia.